

PERANAN LUMBUNG PANGAN DAN PENGGILINGAN PADI DALAM MENDUKUNG PEMBIAYAAN USAHATANI DI SUMATERA SELATAN

Yanter Hutapea dan Hermanto

*Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Selatan
Jl. Kol. H. Barlian Km. 6 No 83 Palembang 30153, Sumatera Selatan*

ABSTRACT

The Role of Rice Barn and Rice Milling Unit to Support farming Finance in South Sumatera. The aimed of this assessment was to know: 1) The performance of rice barn and rice milling unit (RMU) to serve farmer 2) the farmer's accessibility to rice barn and RMU. Survey was conducted from March to May 2006 in 8 regencies (OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin). Data were collected by interviewing 19 members of rice barn, 25 customers of RMU, 14 rice barn leaders and 21 RMU owners. The result of this assessment showed that the scarcity of capital faced by the farmer household generally in order to develop their farming. The financial institute such as rice barn and RMU in rural areas could be accessed by the farmer to get the operational cost of farming. The average of cash money of rice barn and RMU with magnitude of Rp.25.329.880 dan Rp.46.483.300, respectively. The amount of rice barn have credits and debts with magnitude of 35,71% and 14,28% respectively. Meanwhile, RMU have credits and debts with magnitude of 38,09% and 9,52% respectively. Many of Rice barn and RMU have post-harvest and ploughing facilities, input production supply, besides lending the money that used for production cost. The owner of RMU appear to help farmer easily, nevertheless many of them were not able to fulfill the farmer needs. Rice barn institutes developed by government was not available yet to lend the financial capital for the farmer.

Key words : *Rice barn, rice milling unit, farmer accessibility*

ABSTRAK

Pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) keragaan lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi dalam melayani kebutuhan petani 2) aksesibilitas petani terhadap lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi. Survei dilakukan pada bulan Maret sampai Mei 2006 di 8 kabupaten (OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin). Data dikumpulkan dengan mewawancarai 19 orang petani anggota lumbung pangan, 25 orang petani pelanggan penggilingan padi, 14 orang pengelola lumbung pangan dan 21 orang pemilik penggilingan padi. Hasil kajian menunjukkan bahwa rumah tangga petani umumnya mengalami masalah keterbatasan modal dalam mengembangkan usahatannya. Lumbung pangan dan penggilingan padi merupakan lembaga ekonomi di perdesaan yang diakses petani untuk mendapatkan modal. Modal tunai rata-rata pada lembaga lumbung pangan dan penggilingan masing-masing sebesar Rp.25.329.880 dan Rp.46.483.300. Sebanyak 35,71% lumbung memiliki piutang dan 14,28% memiliki hutang. Sedangkan penggilingan padi, sebanyak 38,09% memiliki piutang dan 9,52% memiliki hutang. Beberapa di antara lumbung dan penggilingan padi juga memiliki fasilitas untuk pengeringan gabah, pengolahan lahan dan penyediaan sarana produksi selain menyediakan modal untuk biaya produksi usahatani. Pemilik penggilingan padi sering tampil sebagai penolong dengan kemudahan yang diberikannya, meskipun belum semuanya mampu melayani kebutuhan petani. Lumbung pangan sebagai lembaga ekonomi yang dibentuk pemerintah belum mampu berperan penuh dalam melayani kebutuhan petani.

Kata kunci: *Lumbung pangan, penggilingan padi, aksesibilitas petani*

PENDAHULUAN

Aspek ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam kerangka pembangunan pertanian dan nasional di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan dijadikannya isu ketahanan pangan sebagai fokus kebijaksanaan operasional pembangunan pertanian dalam Kabinet Indonesia Bersatu (2005-2009), disamping peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani. Menurut Azahari (1997) pangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan terjangkau oleh daya beli masyarakat akan memberi rasa aman sehingga memberi dukungan terhadap stabilitas nasional. Upaya meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga memang merupakan hal yang kompleks dan terkait dengan masalah ketahanan pangan secara nasional (Suryana *et al.*, 1997).

Hasil konferensi Dewan Ketahanan Pangan tahun 2002 telah mengisyaratkan bahwa untuk mendukung pencapaian kondisi ketahanan pangan, para pimpinan wilayah di daerah diharapkan mampu memfasilitasi petani untuk mengakses pasar, permodalan dan teknologi secara optimal. Selain itu, para pimpinan wilayah juga diharapkan dapat membangun infrastruktur penunjang yang memadai di perdesaan serta memfasilitasi terjadinya kemitraan usaha antara petani/kelompok tani dengan industri/swasta yang bergerak dibidang agribisnis (Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2006).

Rumah tangga petani di perdesaan mempertahankan hidupnya dengan menghasilkan bahan pangan untuk kebutuhan keluarga dan sebagian dijual. Untuk mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas lahan usahataniya perlu didukung dengan pengembangan teknologi (Reintjes *et al.*, 2003). Salah satu masalah utama yang sering dihadapi petani dalam mengembangkan usahanya adalah keterbatasan modal. Kondisi seperti ini sangat berpengaruh pada upaya pencapaian ketahanan pangan yang mantap.

Sehingga kehadiran lembaga ekonomi untuk menyalurkan kredit, menambah modal usaha dan bantuan lainnya sangat diharapkan (Sumaryanto dan Pasandaran, 1991; Syafa'at dan Djauhari, 1992; Manurung, 1998). Adanya akses untuk mendapatkan kredit dengan biaya murah dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan petani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan ketersediaan pangan.

Lembaga ekonomi dapat dilihat dari formalitas dan kekuatannya beroperasi di perdesaan. Berdasarkan pengamatan di lapangan ada beberapa jenis lembaga ekonomi yang menonjol yaitu terkait dengan permodalan, penyediaan agroinput, penyaluran tenaga kerja, pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk (Syahyuti, 2004). Sektor pertanian

memang dianggap berisiko tinggi oleh perbankan karena lahan pertanian sebagai salah satu aset milik petani yang paling berharga, luasnya semakin sempit akibat sebagian dijual atau berlakunya sistem waris, menyebabkan semakin kecilnya pendapatan petani. Ini berdampak pada terhambatnya aliran modal ke sektor pertanian. Selanjutnya Pranadji (2003) menyatakan, jika sistem kelembagaan ekonomi masyarakat dibiarkan rapuh, maka program pengembangan teknologi, inovasi dan investasi apapun tidak akan mampu menjadi mesin penggerak kemajuan ekonomi yang tangguh.

Akses rumah tangga petani terhadap modal ini dapat dilakukan melalui kemitraan. Kemitraan yang penting untuk dikembangkan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan, khususnya di Sumatera Selatan adalah dengan lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi. Upaya penguatan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mendorong aliran modal ke perdesaan dan mengelolanya untuk mengembangkan potensi pertanian. Hal ini sangat penting mengingat dewasa ini arus modal lebih kuat mengalir dari desa ke kota dari pada sebaliknya.

Pemerintah dalam kurun waktu yang panjang, telah banyak mengembangkan berbagai

kelembagaan permodalan bagi petani, tetapi sebagian besar lembaga tersebut berakhir dengan kinerja yang kurang menggembirakan. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengetahui keragaan lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi terkait dengan layanannya terhadap petani dan (2) mengetahui aksesibilitas petani terhadap lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi.

METODOLOGI

Lokasi dan Waktu

Pengkajian dilaksanakan mulai bulan Maret hingga Mei 2006. Penentuan lokasi desa pengkajian dilakukan secara *purposive*, pada delapan kabupaten (OKI, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim, Lahat, Musi Rawas, Musi Banyuasin dan Banyuasin) dengan menginventarisir lumbung pangan bentukan pemerintah pada masing-masing kabupaten. Selanjutnya pada kabupaten yang sama juga dilacak penggilingan di lokasi yang berdekatan dengan lumbung pangan pada desa atau kecamatan yang sama.

Data dan Informasi

Unit sampel pada kegiatan ini adalah petani, pengusaha penggilingan padi dan pengelola lumbung pangan yang dipilih secara acak (*Random Sampling Unit*) dari masing-masing desa yang terpilih. Total responden sebanyak 79 orang, terdiri dari: petani anggota lumbung pangan 19 orang, petani pelanggan penggilingan padi 25 orang, pengelola lumbung pangan 14 orang dan pengusaha penggilingan padi 21 orang. Secara keseluruhan maka lokasi dan jenis lembaga yang disurvei seperti pada Tabel 1.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan petani, kelompok tani pengelola lumbung pangan dan pengusaha

penggilingan padi menggunakan kuesioner melalui pendekatan survei. Sumber data Sekunder diperoleh melalui pendekatan *Desk Studi* (Review dokumenter, dan data-data dari instansi yang terkait, seperti dinas lingkup pertanian, dan kantor desa). Data dan informasi yang diperlukan meliputi layanan yang diterima petani dari lumbung pangan dan penggilingan padi, kondisi eksisting lumbung pangan dan penggilingan padi (keuangan dan pemilikan aset).

Analisis Data

Data yang diperoleh ditabulasi, menampilkan nilai rata-rata dan persentase, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran kondisi finansial, pemilikan aset, kemudahan dalam pemanfaatan sumber permodalan alternatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaan Lumbung Pangan

Pelayanan yang diberikan lumbung pangan pada petani adalah menerima simpanan gabah petani, peminjaman uang dan sarana produksi, layanan pengolahan lahan. Analisis data dilakukan dengan nilai rata-rata dari lembaga lumbung pangan yang memiliki aset yang dihitung, menunjukkan bahwa modal tunai lumbung pangan pada tahun 2006 rata-rata Rp.25.329.880/lumbung dengan kisaran Rp.98.000 - 61.000.000/lumbung. Besarnya piutang rata-rata Rp.28.462.200/lumbung dengan kisaran Rp.6.000.000 - 67.300.000/lumbung, dan besarnya hutang rata-rata Rp.30.700.000/lumbung dengan kisaran Rp.11.400.000 - 50.000.000/lumbung. Namun ada diantara lumbung yang tidak memiliki piutang maupun hutang. Luas lantai jemur rata-rata 99,2 m²/lumbung dengan kisaran 18 - 300 m²/lumbung. Ukuran gudang pada lumbung yang memilikinya rata-rata 30,81 m²/lumbung, dengan kisaran 12-60 m²/lumbung, dengan

Tabel 1. Lokasi Survei Terpilih dan Jenis Lembaga Permodalan

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Jenis Lembaga Permodalan	
1.	Ogan Komering Ulu Timur (OKU Timur)	Semendawai Suku III	Sido Waluyo	Lumbung pangan	
			Rejosari	Penggilingan	
			Trimuharjo	Penggilingan	
			Belintang I	Lumbung pangan, Penggilingan	
2.	Ogan Komering Ilir (OKI)	Lempuing	Tugu Agung	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Bumi Agung	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Lubuk Seberuk	Penggilingan	
			Kota Kayu Agung	Srigeni Baru	Penggilingan
			Celikah	Penggilingan	
3.	Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan)	Buay Pemaca	Sepakat Jaya	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Sri Menanti	Penggilingan	
4.	Muara Enim	Tanjung Agung	Tanjung Karang	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Sleman	Penggilingan	
			Muara Enim	Muara Lawai	Lumbung pangan, Penggilingan
5.	Musi Rawas	Megang Sakti	Megang Sakti V	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Purwodadi	P. Mardiharjo	Penggilingan
			Karyadadi	Lumbung pangan	
6.	Musi Banyuasin	Sekayu	Sekayu	Penggilingan	
			Sukarami	Penggilingan	
			Babat Toman	Lumbung pangan	
			Rambutan	Sako	Lumbung pangan, Penggilingan
7.	Banyuasin	Rambutan	Banyu Urip	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Talang Kelapa	Lumbung pangan, Penggilingan	
8.	Lahat	Pulau Pinang	Tanjung Agung	Lumbung pangan, Penggilingan	
			Kota Agung	Pandan Agung Ilir	Lumbung pangan, Penggilingan

kapasitas tampung rata-rata 23,44 t/lumbung berkisar 5-50 t/lumbung (Tabel 2).

Pemilikan aset pada lumbung pangan menggambarkan bahwa selain lumbung pangan berperan menerima gabah untuk disimpan di lumbung, juga memiliki kemampuan yang beragam dalam melayani kebutuhan petani

seperti penjemuran, pengolahan gabah dan pengolahan lahan, meskipun kemampuan-kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh semua lumbung.

Data pada Tabel 2 di atas memperlihatkan bahwa 35,71% lumbung pangan yang memiliki fasilitas mengolah lahan dan

Tabel 2. Keragaan Lumbung Pangan di Sumatera Selatan Tahun 2006

No	Uraian	Rata-rata *	Jumlah Lumbung (unit)	Persentase lumbung (%) **
1.	Jumlah anggota	32 orang/lumbung	14	100,00
2.	Kondisi keuangan saat ini			
	Modal tunai	Rp.25.329.880/lumbung	14	100,00
	Piutang	Rp.28.462.200/lumbung	5	35,71
	Hutang	Rp.30.700.000/lumbung	2	14,28
3.	Pemilikan aset saat ini			
	Huller	1 unit/lumbung	3	21,42
	Polisher	1 unit/lumbung	2	14,28
	Mesin penggerak RMU	1 unit/lumbung	3	21,42
	Timbangan	1 unit/lumbung	10	71,42
	Traktor tangan	1 unit/lumbung	5	35,71
	Power tresher	1 unit/lumbung	5	35,71
	Luas gudang	30,81 m ² /lumbung	14	100,00
	Daya tampung gudang	23,44 t/lumbung	14	100,00
	Lantai jemur	1 unit/lumbung	5	35,71
	Luas lantai jemur	99,2 m ² /lumbung	5	35,71

Keterangan: * rata-rata dari jumlah lumbung yang memiliki aset tersebut.

** (jumlah lumbung memiliki aset : jumlah lumbung yang diamati) x 100%

merontokkan gabah. Sedangkan yang memiliki huller dan mesin penggerak RMU 21,42% dan yang memiliki polisher sebanyak 14,28% lumbung. Dengan demikian lumbung pangan yang tidak memiliki aset untuk mengolah lahan sebanyak 64,29%. Sedangkan yang tidak memiliki huller dan mesin penggerak RMU masing-masing sebanyak 78,58 dan 85,72%. Hal ini disebabkan fungsi utama dari lumbung tersebut adalah untuk melakukan tunda jual dengan menampung gabah milik anggota. Sedangkan kegiatan lain seperti penyediaan fasilitas pengolahan lahan dan pasca panen padi adalah merupakan pengembangan usaha lumbung. Namun dalam aktivitas menampung gabah petani, belum semua lumbung memiliki fasilitas lantai jemur. Dari 14 lembaga lumbung pangan tersebut, hanya 35,71% yang memiliki fasilitas lantai jemur. Dengan demikian sebanyak 64,29% lumbung pangan menyerahkan semua proses pengeringan pada anggotanya.

Jumlah lumbung yang membedakan layanan antara anggota dengan bukan sebanyak 15,78%. Dengan demikian sebagian besar

lumbung pangan tidak membedakan pelayanan antara anggota dan bukan anggota. Perbedaan yang dilakukan oleh lumbung antara petani anggota dengan bukan anggota lumbung adalah dalam hal bantuan jika mendapat musibah, hari raya dan perbedaan dalam melayani pinjaman yang dibedakan dengan besarnya kompensasi pengembalian pinjaman. Dari 5 kaleng gabah yang dipinjam, dikembalikan 6 kaleng oleh anggota. Sedangkan jika bukan anggota, mengembalikan sebanyak 6,5 kaleng.

Sebanyak 14,28% lumbung pangan yang meminjam modal dan hanya 14,28% juga yang berniat untuk meminjam uang kembali pada tahun mendatang, sedangkan 21,42% tidak berniat untuk meminjam uang dan sisanya 64,28% ragu-ragu, apakah meminjam atau tidak. Terbatasnya pengelola lumbung yang berniat meminjam kembali (14,28%), karena lumbung-lumbung tersebut saat ini sudah memiliki akses ke pedagang atau koperasi. Sedangkan 21,42% pengelola yang tidak berniat, karena kesulitan yang pernah mereka hadapi dalam mengakses bantuan terutama dari

perbankan. Dengan demikian lumbung pangan, sebagai suatu kelembagaan di perdesaan dengan skala usaha kecil, dari segi ekonomi termasuk lemah. Usaha semacam ini aksesnya ke sumber permodalan terbatas dan menghadapi resiko usaha yang besar (Supriyati dan Suryani, 2006). Kelompok tani atau dari petani yang bermodal tampaknya lebih disukai pihak lumbung pangan untuk memperoleh bantuan modal tersebut karena tidak rumit, tanpa jaminan dan kalupun ada sangsi, biasanya sangsinya ringan.

Akses Petani Terhadap Lumbung Pangan

Petani anggota lumbung pangan memiliki luas lahan sawah rata-rata 1,44 ha dengan luas yang ditanami rata-rata 1,31 ha. Lumbung pangan juga melayani pinjaman uang terhadap anggota, dan anggota ini sudah dikenal baik oleh pengurus. Kalupun ada jaminan peminjaman, biasanya berupa surat tanah. Dasar penentuan besarnya pinjaman uang itu sesuai kebutuhan dan hasil musyawarah.

Banyaknya gabah yang disimpan oleh anggotanya di lumbung rata-rata 216 kg/petani dengan kisaran 12 - 900kg/petani. Gabah yang

tidak menyimpan gabah untuk benih, karena mereka mengganti benihnya dengan yang baru untuk musim tanam mendatang.

Syarat gabah yang bisa disimpan adalah kering simpan, bersih, dan dikarungkan. Rata-rata harga gabah saat petani menyimpan (periode 2005 - Mei 2006) adalah Rp.1.800/kg dengan kisaran Rp.1.500 - 2.200/kg. Sedangkan harga gabah saat dijual adalah Rp.2.150/kg dengan kisaran Rp.1.600 - 3.000/kg. Dengan demikian terdapat perbedaan harga antara saat menyimpan dan menjual. Dimana pada saat menjual, harga gabah lebih tinggi 19,44% dibanding saat menyimpan. Sehingga tujuan untuk memperoleh posisi harga yang lebih baik dengan kegiatan tunda jual melalui penyimpanan gabah di lumbung dapat tercapai.

Petani yang meminjam uang pada lumbung, rata-rata senilai Rp.645.600/petani dengan kisaran antara Rp.225.000 - 1.500.000/petani. Dasar penentuan pinjaman itu adalah hasil musyawarah dan berdasarkan kebutuhan petani. Banyaknya benih padi dipinjam petani rata-rata 61 kg/petani, berkisar 25-100 kg/petani (Tabel 3). Sedangkan pupuk urea rata-rata 150

Tabel 3. Layanan yang Diterima Petani dari Lumbung Pangan di Sumatera Selatan Tahun 2006

No	Uraian	Rata-rata *	Petani mengakses (orang)	Persentase petani (%) **
1.	Gabah disimpan di lumbung	216 kg/petani	13	68,42
2.	Berat gabah saat dijual	200 kg/petani	13	68,42
3.	Pengolahan lahan	0,83 ha/petani	3	15,78
4.	Pinjaman-pinjaman			
	Modal kerja	Rp.645.600 /petani	9	47,36
	Benih	61 kg/petani	5	26,31
	Pupuk Urea	150 kg/petani	6	31,57
	Pupuk SP 36	125 kg/petani	6	31,57
	Pupuk KCl	50 kg/petani	1	5,26
	Insektisida	2 lt/petani	5	26,31
	Herbisida	1,12 lt/petani	4	21,05

Keterangan: * rata-rata dari petani yang mengakses

** (jumlah petani yang mengakses : jumlah petani diwawancarai) x 100%

disimpan ini, selain sebagai cadangan untuk dijual sewaktu-waktu jika harga tinggi, juga untuk stok benih. Namun ada juga petani yang

kg/petani, berkisar 100 - 300 kg/petani, SP 36 rata-rata 125 kg/petani dengan kisaran 100 - 200 kg/petani, KCl 50 kg/petani (hanya dipinjam

oleh seorang petani). Banyaknya insektisida yang dipinjam petani melalui lumbung pangan rata-rata 2 lt/petani dengan kisaran 1-4 lt/petani, herbisida rata-rata 1,12 lt/petani, dengan kisaran 0,5-2 lt/petani. Petani menerima layanan pengolahan lahan dari pihak lumbung pangan dengan luasan rata-rata 0,83 ha/petani, berkisar 0,5-1 ha dengan lama hari kerja 1-3 hari.

Bila diperhatikan lebih lanjut (Tabel 3) tidak semua petani anggota lumbung tersebut terlayani oleh lumbung pangan. Untuk penyimpanan gabah sebanyak 68,42% anggota yang dilayani, sedangkan pengolahan lahan hanya 15,78% anggota. Selanjutnya untuk modal kerja, kebutuhan benih, pupuk dan pestisida maka masing-masing anggota yang terlayani adalah 47,36; 26,31; 31,57 dan 26,31%. Untuk anggota yang tidak terlayani dari lembaga lumbung pangan dalam mengakses sarana produksi ini, biasanya mereka memperolehnya dari penggilingan, kelompok tani atau melalui pedagang saprodi yang dapat dibeli secara langsung ataupun membayar kemudian setelah panen.

Selain petani memiliki hubungan dengan lumbung pangan, maka dalam upaya mengembangkan usaha pertaniannya, merekapun mempunyai hubungan dengan pihak lain seperti: penggilingan., pedagang saprodi (penyedia input), pedagang beras (membeli beras), PPL (pembinaan). Penggilingan, pedagang hasil, lumbung pangan tampaknya lebih diminati untuk tempat peminjaman uang oleh petani dibanding bank, pegadaian dan koperasi.

Disamping sebagai wadah untuk pengamanan pangan sewaktu dalam keadaan paceklik, dilihat dari keberadaannya yang dapat berfungsi sebagai penyedia modal (uang) dan sarana produksi usahatani seperti (benih, pupuk, pestisida), maka eksistensi dari lumbung pangan ini masih lemah. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya keterlibatan lumbung pangan dalam pelayanannya pada petani. Kemampuan lumbung pangan yang rendah dalam melayani

kebutuhan petani ini cukup beralasan karena sumber modalnya yang sebagian besar pada tahap awalnya adalah murni dari bantuan pemerintah, yang kemudian modal itu dapat saja berkembang tergantung pada unit-unit usaha yang berkembang dalam lembaga tersebut.

Keragaan Penggilingan Padi

Analisis data yang dilakukan dengan nilai rata-rata dari penggilingan padi yang memiliki aset yang dihitung, menunjukkan bahwa modal tunai penggilingan rata-rata Rp.46.483.300/penggilingan, dengan kisaran Rp1.000.000 - 200.000.000/penggilingan. Adapun besarnya piutang rata-rata Rp.16.193.750/penggilingan dengan kisaran Rp.750.000 - 50.000.000/penggilingan, dan hutang rata-rata mencapai Rp.3.750.000/penggilingan, dengan kisaran Rp2.500.000 - 5.000.000/penggilingan. Namun ada juga yang tidak mempunyai hutang.

Terkait dengan kegiatan penggilingan padi, ternyata tidak semua penggilingan memiliki fasilitas pengeringan. Jumlah penggilingan yang memiliki lantai jemur sebanyak 52,38%. Luas lantai jemur rata-rata 572,3 m²/penggilingan, berkisar antara 30 - 698 m²/penggilingan. Sedangkan yang memiliki pengering mekanis hanya 19,04% (Tabel 4).

Untuk menampung hasil panen, beberapa penggilingan yang disurvei ternyata memiliki gudang. Gudang yang dimaksud adalah gudang yang letaknya terpisah atau berdampingan dengan penggilingan padi. Sebanyak 38,09% penggilingan padi memiliki gudang dimaksud (Tabel 4). Luas gudang rata-rata berkisar 65,14 m²/penggilingan dengan kisaran 18 - 130 m²/penggilingan, dan daya tampung gudang tersebut rata-rata 37,87 t/penggilingan dengan kisaran 8 - 80 t/penggilingan. Penggilingan padi yang tidak memiliki gudang, menampung gabah/beras di dalam ruang (pabrik) penggilingan padi tersebut.

Tabel 4. Keragaan Penggilingan Padi di Sumatera Selatan Tahun 2006

No	Uraian	Rata-rata *	Jumlah Penggilingan (unit)	Persentase Penggilingan (%) **
1.	Jumlah pelanggan	28 orang/penggilingan	21	100,00
2.	Kondisi keuangan saat ini			
	Modal tunai	Rp.46.483.300/penggilingan	21	100,00
	Piutang	Rp.16.193.750/penggilingan	8	38,09
	Hutang	Rp.3.750.000/penggilingan	2	9,52
3.	Pemilikan aset saat ini			
	Huller	1 unit/penggilingan	21	100,00
	Polisher	1 unit/penggilingan	11	52,38
	Mesin penggerak RMU	1 unit/penggilingan	21	100,00
	Timbangan	1 unit/penggilingan	11	80,95
	Traktor tangan	1 unit/penggilingan	8	38,09
	Power tresher	1 unit/penggilingan	9	42,85
	Mesin jahit karung	1 unit/penggilingan	5	23,80
	Pengering mekanis	1 unit/penggilingan	4	19,04
	Pompa air	1 unit/penggilingan	6	28,57
	Luas gudang	65,14 m ² /penggilingan	8	38,09
	Daya tampung gudang	37,87 ton/penggilingan	8	38,09
	Lantai jemur	1 unit/penggilingan	11	52,38
	Luas lantai jemur	572,3 m ² /penggilingan	11	52,38

Keterangan: * rata-rata dari jumlah penggilingan padi yang memiliki aset tersebut.

** (jumlah penggilingan memiliki aset: jumlah penggilingan yang diamati) x 100%

Pemilikan aset penggilingan menggambarkan bahwa, selain menggiling padi untuk dijadikan beras, penggilingan juga melakukan penjemuran/pengeringan gabah, pengolahan lahan dengan kemampuan yang bervariasi antar penggilingan. Di samping itu juga melayani peminjaman modal untuk petani. Pada dasarnya, syarat peminjaman uang oleh petani pelanggan tidak ada. Namun ada di antara penggilingan yang mensyaratkan surat tanah. Penentuan besar pinjaman berdasarkan kebutuhan petani, luas milik sawah, kemampuan usaha. Pembayaran hutang secara angsuran, yamen dan juga secara natura dalam bentuk beras.

Sebanyak 9,52% pemilik penggilingan meminjamkan uang untuk usahanya dan pada musim tanam mendatang 33,33% penggilingan tidak berniat meminjam uang kembali. Terdapat 28,57% pemilik penggilingan yang berniat untuk

meminjam uang kembali serta 38,09% yang ragu untuk memutuskan meminjam atau tidak meminjam uang lagi. Sebanyak 42,85% pemilik penggilingan, juga melayani penggilingan padi petani yang tidak meminjam modal usaha dari penggilingan tersebut. Hanya 9,52% penggilingan yang membedakan layanan antara pelanggan dengan bukan pelanggan penggilingan.

Akses Petani Terhadap Penggilingan Padi

Petani pelanggan penggilingan padi memiliki luas lahan sawah rata-rata 3,48 ha dengan luas yang ditanami rata-rata 3,27 ha. Luas pengolahan lahan milik petani rata-rata 5,51 ha/petani dalam satu tahun yang berkisar 0,5 - 25 ha dengan lama pengolahan berkisar 1-25 hari. Banyak gabah petani yang digiling pada musim tanam terakhir (MH 2005/2006) rata-rata 5,6 t/petani, dengan kisaran 1 - 400 t/petani.

Panjangnya rentang kisaran ini disebabkan adanya pemilikan lahan yang mencapai 25 ha.

Layanan yang diterima petani dalam hal peminjaman uang rata-rata Rp.573.350 /petani dengan kisaran Rp.570.000 - 1.750.000/petani,- Syarat khusus dalam peminjaman uang tidak ada, namun petani diwajibkan menggilingkan padinya di penggilingan tersebut. Dasar pemberian pinjaman adalah kesepakatan berdasarkan luas pemilikan lahan dan juga kebutuhan. Cara pengembalian pinjaman adalah dengan melakukan pembayaran setelah panen (yarnen) dan natura dalam bentuk beras yang disesuaikan dengan harga beras pada saat proses penggilingan.

Benih padi yang dipinjam petani rata-rata sebanyak 40 kg/petani dengan kisaran 30-50 kg/petani, pupuk urea rata-rata sebanyak 605 kg/petani, yang berkisar 50-4.000 kg/petani, SP 36 rata-rata sebanyak 355 kg/petani, dengan kisaran 25-2.000 kg/petani, sedangkan KCl rata-rata 231 kg/petani dengan kisaran 20-1.000 kg/petani. Adapun insektisida dipinjam petani dari penggilingan rata-rata sebanyak 1,37 lt/petani dengan kisaran 0,5-2 lt/petani dan herbisida sebanyak 2,12 lt/petani dengan kisaran 0,5-4 lt/petani.

Bila diperhatikan lebih lanjut (Tabel 5) tidak semua petani pelanggan terakses pada

usaha penggilingan tersebut. Untuk menggiling padi dan pengolahan lahan sebanyak 36,84% petani pelanggan yang mengaksesnya. Selanjutnya untuk modal kerja, kebutuhan benih, pupuk dan pestisida maka masing-masing yang terlayani adalah 44; 16; 40 dan 16% petani pelanggan. Petani memang sudah memperoleh benih dari pedagang (22%), penangkar benih (22%) atau seleksi dari hasil tanam sebelumnya (40%). Sedangkan pestisida sebagian besar diperoleh petani dengan berhutang pada pedagang saprodi (44%) dan membeli sendiri (40%).

Sebanyak 28% petani, menabung hasil penjualan berasnya dengan jumlah yang ditabung berkisar 10-50% dari hasil penjualan. Tindakan yang dilakukan oleh petani ini merupakan upaya untuk mengakumulasi modal, karena uang yang disimpan tersebut dapat digunakan untuk memperbesar modal usahatani di masa mendatang (Todaro, 2000).

Hubungan antara petani dengan pihak penggilinganpun bervariasi seperti hubungan keluarga 32%, tetangga 8%, teman 40%, dan pelanggan lama 20%. Untuk mempertahankan hubungan antara pemilik penggilingan dengan petani, biasanya pihak penggilingan memberikan bantuan pada petani pada saat petani mengalami musibah, antar jemput gabah dan harga beli

Tabel 5. Layanan yang Diterima Petani dari Penggilingan Padi di Sumatera Selatan Tahun 2006

No	Uraian	Rata-rata *)	Petani mengakses (orang)	Persentase petani (%)
1.	Penggilingan gabah musim hujan 2005/2006	5,6 t/petani	25	100,00
2.	Pengolahan lahan	5,51 ha/petani	9	36,00
3.	Pinjaman-pinjaman:			
	Modal kerja	Rp.573.350/petani	11	44,00
	Benih	40 kg/petani	4	16,00
	Pupuk Urea	605 kg/petani	10	40,00
	Pupuk SP 36	355 kg/petani	10	40,00
	Pupuk KCl	231 kg/petani	5	20,00
	Insektisida	1,37 lt/petani	4	16,00
	Herbisida	2,12 lt/petani	4	16,00

Keterangan: * rata-rata dari petani yang mengakses

** (jumlah petani yang mengakses: jumlah petani yang diwawancarai) x 100%

beras yang lebih tinggi pada anggota. Pola yang terjadi antara pemilik penggilingan dengan petani menunjukkan bahwa selain hubungan jual beli, maka didasarkan juga pada ikatan kepercayaan antara pemilik penggilingan dengan petani (Pranadji, 2004)

Keberadaan penggilingan muncul sebagai lembaga yang lahir dari bawah. Industri penggilingan padi ini semakin berkembang di wilayah pengembangan transmigrasi. Usaha inipun telah berkembang pada masyarakat lokal yang mengusahakan tanaman padi berumur panjang. Dalam kaitannya dengan pelayanan yang diberikan pada petani, tampaknya kemampuan penggilingan inipun masih sangat terbatas..

Keberadaan penggilingan di perdesaan dengan basis tanaman padi relatif cukup banyak (kurang lebih 10 penggilingan), sementara jumlah gabah yang digiling per tahunnya masih relatif terbatas, apalagi jika berada di agroekosistem lebak atau pasang surut yang umumnya masih ditanam 1 kali dalam satu tahun. Sehingga penggilingan itu mengalami masa istirahat cukup panjang diluar musim panennya. Hal ini terkait dengan sifat musiman tanaman padi sehingga kontinuitas produk agroindustri tak terjamin (Rachman dan Sumedi, 2002). Akibatnya kemampuan permodalan lembaga tersebut cukup rendah untuk membantu kebutuhan sarana produksi petani. Apalagi jika bantuan tersebut diperlukan juga untuk kebutuhan luar usahatani padi bahkan mungkin juga untuk keperluan luar pertanian. Pada kenyataannya penggilingan padi yang beroperasi di wilayah dengan penanaman padi dua kali dalam satu tahun lebih mampu untuk menyediakan bantuan pada petani.

Kemudahan yang Diterima Petani

Modal memiliki peranan penting untuk menciptakan faktor-faktor lain seperti penyediaan input teknologi, membayar upah tenaga kerja, bahkan untuk perbaikan prasarana pembangunan pertanian (Sukirno, 1985). Petani

dalam upaya mengembangkan usahatannya mengakses modal dari penggilingan dan lumbung pangan. Dengan bantuan kredit, diharapkan petani dapat meningkatkan kemampuan dalam menjalankan aktivitas produksinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan (Syukur, 1992).

Sumber modal pada lumbung pangan umumnya berasal dari bantuan pemerintah. Modal tersebut berupa dana talangan tanpa bunga untuk pembelian gabah dan beras disaat panen raya. Adanya penguatan modal memang dapat membantu membeli gabah/beras petani di atas harga pembelian pemerintah. Beberapa lumbung ada yang tidak mampu mengembangkan modalnya, terutama jika muncul kesan pada masyarakat bahwa bantuan tersebut adalah dari pemerintah yang juga berasal dari dana masyarakat yang disalurkan kembali dalam bentuk bantuan. Kemudahan yang dirasakan petani dari lembaga lumbung pangan dan penggilingan padi tersebut adalah:

1. Peminjaman modal usaha dengan dasar saling percaya dan persyaratannya lunak.

Pinjaman uang di lumbung dan penggilingan yang seringkali didasari dengan modal kepercayaan ini, memang akan memberikan kemudahan bagi petani untuk mengelola usahatani. Ini juga menyebabkan mengapa petani merasa lebih memilih meminjam uang di penggilingan atau lumbung (jika masih ada dana) dibanding pada lembaga keuangan formal (koperasi unit desa, Bank Rakyat Indonesia di tingkat kecamatan).

Menggilingkan gabahnya ke penggilingan merupakan salah satu syarat bagi petani untuk meminjam uang dan saprodi dari penggilingan. Besarnya pinjaman disesuaikan dengan luas lahan garapan. Selain itu, tidak rumit, bunga rendah (1-3%/bulan), bahkan ada penggilingan yang tidak mengenakan bunga, namun pelayanannya tetap baik. Hal serupa juga terjadi pada hasil studi Manurung (1998) pada lembaga

perkreditan yang melayani nelayan dalam usaha penangkapan ikan Tuna skala kecil di Kawasan Indonesia Timur.

Penggilingan padi umumnya milik pribadi petani, dan sebagian kecil yang dimiliki kelompok. Pemberian pinjaman dari penggilingan ini seringkali tanpa ikatan yang ketat. Mereka mendasarinya hanya atas rasa saling percaya. Si pemilik penggilingan yakin bahwa peminjam akan mengembalikan uangnya dan si peminjam yang umumnya sudah kenal dekat dengan pemilik, mungkin sebagai teman sesama petani, atau anggota keluarga, merasa berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Mereka juga menyadari bahwa usaha tersebut adalah usaha keluarga pemilik penggilingan yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup sipemiliknya. Sumber modal selain dari pribadi pemiliknya, juga dari sumber lain, baik dari instansi swasta, pemerintah maupun perorangan. Inipun disadari oleh si peminjam uang.

Pinjaman anggota kelompok lumbung umumnya diberikan tanpa sanksi yang ketat, sehingga sering menyebabkan upaya untuk pengembaliannya menjadi tidak sungguh-sungguh. Tanpa sanksi yang ketat ini, hambatan memang dirasakan pengurus lumbung pangan untuk meningkatkan modalnya, sedangkan anggotanya mendapatkan kemudahan dalam hal permodalan usahatani. Dengan demikian lebih nyata adanya upaya untuk mengelolanya secara profesional pada penggilingan ini, karena akan mempengaruhi roda kehidupan keluarga pemilik penggilingan. Sehingga lebih terjamin kemungkinan untuk pengembangan keuangan di penggilingan ini dari pada di lumbung pangan.

2. Ada tenggang waktu yang memudahkan petani untuk mengembalikan pinjaman.

Pengembalian pinjaman secara yamen dengan lama pinjaman lebih kurang 5 bulan, merupakan kemudahan tersendiri yang dirasakan petani pada saat meminjam di lumbung pangan, penggilingan ataupun pelepas uang. Karena

dengan cara ini petani tidak harus terburu-buru dalam pengembaliannya. Dengan adanya tenggang waktu ini, ada manfaat bagi lumbung pangan dan penggilingan padi, dimana pinjaman berupa uang, gabah/beras, saprodi ataupun alsintan untuk berusahatani yang dibayar tunai dengan natura (gabah) pada saat panen disesuaikan dengan harga gabah/beras pada saat itu, dan biasanya harga gabah/beras tersebut lebih murah sehingga volume pengembalian menjadi lebih besar.

Jika anggota terlambat membayar, ada lumbung yang tidak mengenakan sanksi apapun, namun ada juga yang memberi sanksi dengan tidak melayaninya jika akan meminjam uang lagi pada musim tanam berikutnya. Untuk keterlambatan pengembalian pinjaman pada penggilingan, petani dapat mengembalikan pada musim berikutnya. Seperti halnya pada lumbung pangan, pada penggilinganpun ada yang tidak mengenakan bunga maupun sanksi.

Selain pada lumbung pangan dan penggilingan, maka petanipun dapat meminjam modal dari pihak lain seperti pelepas uang dan pedagang input dan tuan tanah. Namun tingginya bunga kredit (lebih kurang 10%/bulan) pada sumber non formal ini disebabkan oleh rendahnya kemampuan petani mengembalikan pinjaman secara cepat dan tepat. Dengan demikian, tingginya suku bunga terjadi akibat tidak mengandalkan pada instrumen agunan, namun disertai rasa percaya adalah untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi oleh pelepas uang. Selain itu disebabkan oleh keinginan pemilik modal agar terus terjadi pemasukan akibat tingginya bunga pinjaman (Ghatak, 1992).

Meskipun suku bunganya tinggi, tetapi kredit non formal tetap diminati banyak petani, karena masih banyak petani yang mempunyai kendala seperti adanya agunan dan prosedur administrasi yang rumit untuk mengakses modal pada sumber kredit formal (bank). Petani dengan keterbatasannya dalam hal pengetahuan dan waktu, lebih berorientasi untuk hal-hal yang bersifat sederhana dan praktis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lumbung pangan sebagai lembaga bentukan pemerintah, semuanya memiliki modal tunai yang besarnya rata-rata Rp.25.329.880/lumbung, namun hanya 35,71% yang memiliki piutang dan 14,28% yang memiliki hutang. Penggilingan padi sebagai usaha yang dimiliki secara perorangan, semuanya memiliki modal tunai yang besarnya rata-rata Rp.46.483.300/penggilingan, namun hanya 38,09 yang memiliki piutang dan 9,52% yang memiliki hutang. Dengan demikian baik lumbung pangan maupun penggilingan, hanya sebagian kecil yang memberikan layanan bantuan pembiayaan usahatani, walaupun hanya sebagian kecil juga dari ke dua lembaga tersebut yang memiliki hutang.
2. Lumbung pangan selain melakukan usaha penyimpanan gabah petani yang terkait dengan kegiatan tunda jual hasil panen dan penggilingan padi dengan usaha pasca panen padi, berdasarkan pemilikan asetnya, memiliki kesamaan ruang gerak seperti pengolahan lahan, pengeringan gabah, penyediaan sarana produksi (benih, pupuk dan pestisida).

Saran

1. Lumbung pangan masih memerlukan pembinaan, terkait dengan manajemen usaha, sistem yang berjalan dan kesepakatan untuk menjalaninya.
2. Perlu upaya mendorong perusahaan-perusahaan terutama BUMN untuk memberikan bantuan kepada petani dengan bunga lunak sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap petani kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Azahari, D.H. 1997. Benarkah Ketahanan Pangan Kita Rapuh Dalam Menghadapi Era Globalisasi ? *Dalam* C. Silitonga, A. Fauzi, M.H. Sawit, P. Suharno, A. Soepanto dan M. Ismet (Editor). 30 tahun Peran Bulog Dalam Ketahanan Pangan. Badan Urusan Logistik, Jakarta.
- Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, 2006. Kerangka Acuan Pemantauan Perkembangan Sumber Permodalan Lembaga Ekonomi Perdesaan. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Selatan, Palembang.
- Ghatak, S, 1992. Pertanian dan Pembangunan Ekonomi. Ilmu Ekonomi Pembangunan. N. Gemmell (Editor). LP3ES, Jakarta.
- Manurung, V. T, 1998. Keragaan dan Kelembagaan Perkreditan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Skala Kecil di Kawasan Indonesia Timur. FAE Vol. 16 No. 2.
- Pranadji, T. 2002. Reformasi Kelembagaan dan Kemandirian Perekonomian Pedesaan: Kajian Pada Kasus Perekonomian Padi sawah. *Dalam* Kasryno, F., E. Pasandaran dan A.M, Fagi (editor). Ekonomi Padi dan Beras Indonesia. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Jakarta.
- _____. 2003. Diagnosa Kerapuhan Kelembagaan Perekonomian Perdesaan. FAE Vol. 21 No. 2.
- Rachman, B dan Sumedi (2002). Kajian Efisiensi Manajemen dalam Pengelolaan Agroindustri. Dalam Analisis Kebijakan: Paradigma Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengembangan Agroindustri. Monograph Series No. 21. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

- Reintjes C., B. Haverkort dan A. W. Bayer. 2003. *Pertanian Masa Depan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta.
- Sukirno, S., 1985. *Ekonomi Pembangunan. Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kerjasama Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dengan Bina Grafika, Jakarta.
- Sumaryanto dan E. Pasandaran, 1991. *Keragaan Kredit Usahatani Dalam Menunjang Peningkatan Produksi Pangan*. FAE Vol. 9 No.1.
- Supriyati dan E, Suryani, 2006. *Peranan, Peluang dan Kendala Pengembangan Agribisnis di Indonesia*. FAE Vol 24 No 2.
- Suryana, A., I.W. Rusastra dan S.H. Suhartini. 1997. *Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dalam Rangka Ketahanan Pangan Rumah Tangga*. Dalam A. Suryana, T. Sudaryanto dan S. Mardianto (Editor). *Kebijakan Pembangunan Pertanian: Analisis Kebijakan Antisipatif dan Responsif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Syafa'at, N dan A. Djauhari, 1992. *Identifikasi Penyebab Rendahnya Penyaluran Kredit Usahatani*. FAE Vol. 9 No 2 & Vol 10 No 1.
- Syahyuti, 2004. *Pemerintah, Pasar dan Komunitas. Faktor Utama dalam Pengembangan Agribisnis di Perdesaan*. FAE Vol. 22 No. 1.
- Syukur, M, 1992. *Karya Usaha Mandiri (KUM). Suatu Model Alternatif Skim Kredit untuk Golongan Miskin di Perdesaan Indonesia*. FAE Vol. 9 No 2 & Vol 10 No 1.
- Todaro, M.P, 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Penerbit Erlangga, Jakarta.